

**PEJABAT
PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
(PPID)**

**LAPORAN
TAHUNAN**

PPID PEMBANTU PELAKSANA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN
MEKANISASI PERTANIAN



**BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018**

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



**BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018**

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN, SERPONG TAHUN 2018

I. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

1.1. Kebijakan Umum Pengelolaan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibkan setiap Badan Publik menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu : (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140//2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; dan (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon

dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dengan telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pelaksana lingkup BBP Mektan, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di BBP Mektan.

1.2. Layanan Informasi Publik sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam memberikan layanan informasi publik, salah satunya adalah dengan menggunakan sistem informasi berbasis *web*. Informasi publik yang wajib disajikan lewat web yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan) antara lain : profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, laporan tahunan, serta laporan LAKIP; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (BBP Mektan, tidak memiliki informasi ini); serta Informasi yang wajib disediakan setiap saat, antara lain : daftar informasi publik, prosedur kerja dan rencana kerja BBP Mektan.

Dengan adanya informasi publik yang lengkap serta mudah diakses diharapkan masyarakat/*stakeholder* dapat dengan mudah mengetahui tentang tugas dan fungsi balai, struktur organisasi, program kerja, anggaran dan informasi lainnya, sehingga informasi keterbukaan publik bisa terlaksana.

Selain informasi tersebut, BBP Mektan juga melakukan kegiatan pelayanan publik dalam bentuk email, telepon dan kunjungan secara langsung.



Gambar 1. Informasi Publik yang telah diupload dalam Web BBP Mektan

Sesuai dengan SK Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Nomor: 117/Kpts/HM.130/H.9/01/2018, tanggal 26 Januari 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, dimana salah satu tugas Pejabat PPID adalah menyediakan akses informasi bagi pemohon informasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dengan telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pelaksana lingkup BBP Mektan, dukungan sarana dan prasarana, petugas pelaksana layanan, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di BBP Mektan.

1.3. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana tersebut antara lain: meja layanan pengunjung perpustakaan, ruang *server* terpisah dari ruangan staf, ruang baca, ruang diskusi, komputer layanan pengunjung, rak *leaflet*, loker barang untuk pengunjung dan *free WIFI*.



Gambar 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Area Perpustakaan

Lobby kantor BBP Mektan yang dilengkapi dengan sofa, bahan informasi/publikasi (buku dan leaflet teknologi mekanisasi pertanian), majalah, koran, SOP layanan dalam bentuk *banner*,

Informasi layanan publik dalam LCD *digital poster*, TV LCD untuk informasi agenda kegiatan, kotak saran, kotak pengaduan dan jalur evakuasi.



Gambar 3. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Area *Lobby* Kantor

Ruang tunggu BBP Mektan telah dilengkapi dengan sofa bahan informasi/publikasi (buku dan leaflet teknologi mekanisasi pertanian), Poster layanan informasi/ layanan publik (visi, misi, struktur organisasi dll) serta fasilitas minum kopi/ teh siap seduh secara gratis bagi pengguna layanan.



Gambar 4. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Pada Ruang Tunggu

Adapun cara memperoleh informasi publik lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Melalui Website atau Email : dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website : <http://www.mekanisasi.litbang.pertanian.go.id> atau melalui email dengan alamat : bbpmektan@litbang.pertanian.go.id atau bbpmektan@gmail.com atau layan.mektan@gmail.com
- b. Melalui Telephone : dapat menghubungi 08119936787
- c. Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat PPID Pembantu Pelaksana BBP Mektan, dengan alamat Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338
- d. Datang langsung : datang langsung ke *desk* layanan informasi, dengan alamat Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Jl. Sinarmas *Boulevard*, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338

Tahun 2018 telah dilakukan penambahan fasilitas berupa rambu-rambu serta penunjuk arah untuk memudahkan pengguna layanan antara lain: rambu kecepatan maksimum, titik kumpul, serta penunjuk arah gedung di kawasan BBP Mektan. Selain itu juga telah dipasang jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, penunjuk arah fasilitas gedung, toilet, jalur evakuasi dan tanda larangan merokok di kawasan BBP Mektan.

Dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik, telah dikembangkan system informasi yang berbasis internet yang dapat ditinjau dan diunduh dihalaman web BBP Mektan, dengan alamat <http://www.mekanisasi.litbang@pertanian.go.id>.





Gambar 5. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Pada Kawasan BBP Mektan

Tahun 2018 juga telah dikembangkan aplikasi untuk mendukung layanan publik meliputi : pengelolaan perpustakaan sistem barcode, kegiatan penelitian/ perekayasaan BBP Mektan, hasil-hasil penelitian/perekayasaan BBP Mektan dan Monev kegiatan BBP Mektan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan data dan informasi dapat tersimpan dan tertata dengan baik, serta mudah dalam pengelolaan monev kegiatan di BBP Mektan.

1.4. Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BBP Mektan, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, telah dibentuk SK Tim PPID Pembantu Pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian nomor 117/kpts/HM.130/H.9/01/2018 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

Petugas layanan informasi publik di BBP Mektan adalah pranata humas, pejabat fungsional khusus, serta staff yang ditunjuk dengan surat penugasan, yang mempunyai tugas menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Sebagian Tim ini juga juga merangkap sebagai tim pengelola TI, perpustakaan digital, dan Medsos serta dalam rangka mendiseminasikan hasil-hasil litbang mekanisasi pertanian.

Pengelolaan informasi publik berbasis internet, dengan alamat <http://www.mekanisasi.litbang.pertanian.go.id>, dikelola oleh Bidang Kerjasama dan

Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian. Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di BBP Mektan, pejabat PPID Pembantu Pelaksana diharapkan tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

1.5. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BBP Mektan pada tahun 2018 telah mempunyai anggaran sendiri. Kegiatan yang telah dilakukan terdiri dari pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik, pengumpulan bahan informasi publik, serta peningkatan kapasitas petugas SDM layanan publik.

1.6. Kegiatan yang dilaksanakan

Tahun 2018 BBP Mektan telah melakukan berbagai kegiatan internal dan eksternal. Selain itu BBP Mektan juga telah mengikuti lomba pemeringkatan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian tingkat Eselon II. Dan tahun 2018 telah memperoleh peringkat IV lingkup Eselon II, Kementerian Pertanian

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan BBP Mektan secara internal terdapat 5 kegiatan, yang meliputi : (1). Sosialisasi pengelolaan layanan informasi publik dengan mengundang narasumber dari Biro HIP, serta dihadiri oleh seluruh karyawan BBP Mektan; (2). Sosialisasi Pemanfaatan Medsos untuk diseminasi teknologi dan layanan informasi publik dengan mengundang narasumber dari Sekretariat Balitbangtan, serta dihadiri oleh seluruh karyawan BBP Mektan; 3) magang bagi petugas layanan informasi publik sebanyak 3 orang ke Biro HIP; 4) Rakor dan monev pengelolaan layanan informasi publik lingkup BBP Mektan, serta 5) Rakor dan *Update* data Informasi publik.

Kegiatan internal bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan pelayanan publik agar terjalin komitmen antar pengelola PPID dan pimpinan

unit serta meningkatkan kapasitas petugas layanan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Hasil kegiatan internal adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi pengelolaan layanan informasi publik, tanggal 19 Februari 2018, di BBP Mektan Serpong.

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Kementerian Pertanian berkaitan sangat erat dengan penerapan dan operasional Manajemen Reformasi Birokrasi, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat tentang pelayanan dan kinerja pegawai negeri sipil yang berada dilingkup Kementerian Pertanian kepada masyarakat umum.

Balai Besar Pengembangan Mekansasi Pertanian (BBP Mektan) melaksanakan sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup BBP Mektan yang dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon III dan IV, dan karyawan (fungsional dan struktural).

Sosialisasi dibuka oleh Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian (KSPHP), Agung Prabowo, mewakili Kepala BBP Mektan dan didampingi oleh Sri Utami, Kepala Seksi Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian (PHP), Serpong, (19/02).

Sebagai narasumber adalah Kepala Bidang Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Dwihesti M., yang dalam sosialisasi tersebut mengatakan bahwa dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat membutuhkan komitmen dan kerjasama setiap pegawai yang ada di UK/UPT di lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, hal yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah dukungan yang diberikan oleh pimpinan dari setiap UK/UPT dalam kelancaran kegiatan layanan informasi publik.

Setiap langkah dalam proses memberikan layanan kepada publik yang memerlukan, harus terekam atau terdokumentasikan secara baik pengarsipan dokumennya dan tersusun secara kronologi. Juga diingatkan oleh Dwihesti., bahwa tidak semua

informasi dapat diberikan kepada masyarakat (pemohon informasi), dan informasi tersebut dilindungi dalam undang undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).



Gambar 6. Kegiatan Sosialisasi pengelolaan layanan informasi publik

Tahun 2017 Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) dalam penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) masuk dalam peringkat 5 besar lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini merupakan capaian positif bagi BBP Mektan. Sosialisasi ditutup dengan diskusi dengan narasumber dan harapan bersama agar kinerja Pelayanan Informasi Publik di BBP Mektan dapat tetap mencapai hasil tertinggi dalam memberikan layanan bagi masyarakat luas.

2. Sosialisasi Pemanfaatan Medsos untuk diseminasi teknologi dan layanan irfomasi publik, tanggal 13 Maret 2018, di BBP Mektan Serpong

Balai Besar pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam rangka meningkatkan peran serta seluruh pegawai dalam mendiseminasikan teknologi pertanian melalui Medsos, maka diadakan Sosialisasi tentang pemanfaatan Media Sosial dengan mengundang narasumber dari Sekretariat Badan Litbang Pertanian.

Suphendi, Kepala Bagian Tata Usaha yang mewakili Kepala Balai Besar dalam pembukaan menyampaikan bahwa, peran Media Sosial sangat penting dalam masyarakat saat ini. Informasi menyebar dengan cepat melalui media maya, oleh karena itu penggunaan media sosial harus dimanfaatkan secara baik dan bijak khususnya untuk diseminasi hasil inovasi teknologi pertanian. Suphendi meminta agar

semua peserta setelah mengikuti sosialisasi ini mampu menggunakan Medsos dengan baik dan bijak, serta dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan respon yang positif serta menyebarkan informasi tentang inovasi teknologi pertanian atau informasi resmi lainnya melalui akun Media Sosial Pribadi masing-masing.



Gambar 7. Narasumber dari sekretariat Balitbangtan memberikan sosialisasi tentang pengelolaan Medsos

Nuning Nugrahani, Kasi Humas Balitbangtan, dalam paparannya mengatakan bahwa Media Sosial merupakan salah satu sarana yang paling efektif saat ini untuk menginformasikan dan mendiseminasikan apa yang telah dihasilkan oleh BBP Mektan. Apa yang telah dihasilkan dan dicapai oleh unit kerja, akan lebih baik bila diketahui oleh khalayak umum, salah satu caranya adalah dengan pemanfaatan Media Sosial. Disamping karena gratis, jangkauannya juga lebih cepat dan lebih luas, tambahnya.

Pada kesempatan ini, selain disampaikan paparan tentang pemanfaat Media Sosial, juga didampingi secara langsung cara membuat Media Sosial (instagram, twitter, youtube dan facebook) serta dilatih untuk membuat video singkat yang dibimbing oleh Tim *Production House* Balitbangtan.

3. Magang bagi petugas layanan informasi publik, tanggal 6-8 Maret 2018, Biro HIP, Jakarta

Magang Petugas Layanan IP di Kementerian Pertanian. Hari pertama Perkenalan tentang Gambaran Umum Pelayanan Informasi PPID yang di arahkan oleh Nur vida

dan Muchril Azwar berisi tentang gambaran Umum PPID dan cara Permohonan Informasi publik.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk itu kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat dan gratis

Beberapa tata cara permohonan informasi publik diantaranya yaitu :

- Melakukan Permohonan di Konter pelayanan publik/ di *lobby*
- Pemohon Akan di tindaklanjuti apa bila permohonan memenuhi syarat (Foto copy KTP/Surat tugas dr Instansi)
- Lama permohonan waktu untuk penyelesaian paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan
- Pejabat menindaklanjuti tentang permohonan informasi yang diminta dan dapat perpanjangan waktu 7 hari kerja
- Penyampaian Permohonan bias diberikan melalui lisan, *Soft copy* ataupun *hard copy*

Materi dilanjut dengan Pengenalan Portal PPID, meliputi :

a. Silayan Online

Caranya masuk ke link mekanisasi-litbang.ppid.go.id lanjut memasukan user nama dan password setelah log in lanjut klik Petugas Silayan lanjut mengisi form informasi pemohon (sebelumnya meminta pemohon untuk mengisi di form manual) dan pastikan pemohon memenuhi persyaratan permohonan dan jika sudah selesai bias ditindak lanjuti seperti penjelasan di tata cara permohonan.

b. Sirekap

Caranya masih sama dengan Silayan Online hanya saja kita pilih icon Rekapitulasi maka jika sudah dr dulu menggunakan Silayan maka data yang diminta dr bulan apa pun tersedia dan disajikan dalam bentuk grafik

Hari Kedua tanggal 7 Maret 2018 di Laksanakan kunjungan ke Komisi Informasi Pusat yang beralamatkan di jalan Abdul Muis No 40 Jakarta Pusat (Wisma BSG Lantai 1) yang arahkan oleh Tya Tirlasari (*Leader* Komisioner Komisi Informasi Pusat)

Fungsi dari Komisi Informasi Pusat

Menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaanya dan menyelesaikan sengketa informasi publik

Tugas dari Komisi Informasi Publik

Pelaksanaan Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau pun persidangan. Menerima, memeriksa dan memutuskan Sengketa di Provinsi ataupun kabupaten. Misalkan ada sengketa antara Si A dan Badan tertentu setelah di periksa dan diselidiki ternyata memang badan Badan tersebut yang salah maka Komisi Infomasi Pusat akan melaksanakan siding dan Badan yang terkena pidana dan yang akan di pidanakan yaitu Atasan tertinggi dari Badan publik ataupun instansi yang bersalah. Dan misalkan ada uang denda itu bukan menjadi tanggung jawab dari Badan tersebut atau pun Instansi melainkan uang pribadi Atasan tersebut sesuai Pasal 51-55 tentang Ketentuan pidana.



Gambar 8. Kunjungan peserta Bimtek ke Komisi Informasi Pusat

Tindakan Untuk BBP Mektan selanjutnya

- 1) Bisa menerapkan dan melaksanakan Silayan Online, Sirekap agar meningkatkan pelayanan informasi publik dan mempermudah untuk mendapatkan informasi.
- 2) Menyadarkan Pimpinan agar bawahan bisa sadar mengikuti dan mengetahui pentingnya PPID dan sengketa bila itu terjadi
- 3) Melengkapi Sarana pra Sarana agar bisa berjalannya PPID dengan baik.

Masukan untuk Layanan IP di BBP Mektan

- 1) Menyeragamkan format form pengunjung di BBP Mektan agar mudah untuk mengisi form di Silayan Online.
- 2) Memberikan arahan kepada security ataupun staf karyawan lainnya tentang PPID
- 3) Menambahkan Poster atau Tv didepan konter yang berisi tentang PPID

4. Rakor dan monev pengelolaan layanan informasi publik lingkup BBP Mektan, tanggal 26 Maret 2018, di BBP Mektan Serpong

Rakor dan Monev dibuka oleh Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian diikuti oleh seluruh Es III dan IV lingkup BBP Mektan, pada tanggal 26 Maret 2018 bertempat di ruang *meeting* BBP Mektan.

Arahan Kepala BBP Mektan: BBP Mektan harus mempertahankan kinerja PPID yang telah dicapai dan meningkatkan kembali kinerja yang telah dicapai, harapannya kesuksesan yang telah dicapai bisa diikuti oleh aspek lainnya antara lain tim *website*, dan pelayanan publik lainnya dalam pelayanan kepada masyarakat. LCS perlu ditingkatkan kembali, dukungan penuh dari Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, hal ini dikarenakan Menteri pertanian setiap hari memantau perkembangan media sosial dikarenakan masih banyak media sosial yang memperkeruh keadaan.

Dalam pengelolaan media sosial perlu strategi untuk pengembangan media sosial. Semua kritik diakomodasi dan dicarikan solusinya untuk pengembangan mekanisasi pertanian. Kinerja kita harus tersampaikan, internal diperkuat, *stake holder* tersampaikan dan informasi apapun bisa tersampaikan dengan baik. Pemanfaatan dan optimalisasi anggaran BBP Mektan untuk kemajuan dan kemaslahatan bersama, rutinitas yang tidak bisa memberikan dampak secara langsung akan dioptimalkan penggunaannya. Pemerataan kegiatan dan kesejahteraan pegawai mektan menjadi utama bagi kemajuan BBP Mektan.

Dalam pengelolaan PPID perlu ditingkatkan lagi, serta mempertahankan capaian yang selama ini telah dicapai, selain itu perlu ditingkatkan lagi kesadaran dan keinginan bersama seluruh pegawai BBP Mektan untuk membangun – memiliki –

perduli akan BBP Mektan, berupaya bersama untuk mencapai tujuan bersama pengembangan BBP Mektan. Berkerja cerdas dan mencari titik dominan untuk mencapai tujuan bersama.

Hal penting yang harus segera dilaksanakan adalah menseragamkan dan mempublikasikan terus menerus posisi, alamat kantor BBP Mektan yang baru, nomor telepon serta alamat email, hal ini sangat perlu dilakukan untuk mempermudah akses dan memberikan informasi yang valid tentang BBP Mektan sehingga dapat mempermudah pengguna layanan dalam mendapatkan informasi.

Mempublikasikan hasil penilaian IKM, karena IKM menjadi salah satu PK (triwulan) badan litbang pertanian. yang perlu diperhatikan juga adalah Disposisi persuratan harus lebih teliti lagi dalam mendistribusikan (p j nya sekretaris kabalai). Untuk ke depan dalam pembuatan laporan PPID ditetapkan per 3 bulan, sk petugas yang melakukan pelayanan publik terkait data yang akan dilaporkan, analisa data sdh dipermudah dengan alur yang ada; era 4:0, era *cyber* untuk *monitoring* palayanan *publik* (dibuat aplikasi khusus).



Gambar 9. Pelaksanaan Rakor dan Mnev Internal PPID lingkup BBP Mektan tahun 2018

5. Rakor pengelolaan layanan informasi publik lingkup BBP Mektan, tanggal 11-13 Mei 2018, di Bogor

Rakor pengelolaan layanan informasi publik ini dilaksanakan dalam rangka update data Informasi Publik untuk persiapan pemeringkatan KIP tahun 2018 . Kegiatan

dilaksanakan pada tanggal 11-13 Mei 2018, di Mess BB Paspas Bogor. Rakor ini dihadiri oleh seluruh Tim PPID dan staff . Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1. penyusunan dan update data selanjutnya di *upload* di *website*; pengisian SAQ dalam rangka pemeringkatan KIP, pemeringkatan *Website* lingkup Kementan, serta pengisian E-Dokumen pada portal PPID.

Data-data yang telah *diupdate* meliputi :

➤ **Kinerja Badan Publik**

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2. Penetapan Kinerja (PK)
3. Capaian Kinerja
4. LAKIP/LAKIN
5. RENSTRA

➤ **Laporan**

1. Judul Penelitian
2. Lap. Bulanan PPID
3. Lap. Akses Informasi Tahunan
4. Lap. Dumas
5. Lap. IKM
6. Lap. Tahunan PPID
7. Kerjasama
8. LHKPN
9. Paten Alsintan
10. Pengujian Alsintan
11. Introduksi Alsintan
12. Kunjungan
13. PKL/Magang
14. Lap. Tahunan BBP Mektan

➤ **Keuangan**

1. DIPA
2. RKA-KL
3. Lap. Keuangan
4. Lap. Realisasi Anggaran
5. Neraca Keuangan

6. Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)
7. Daftar Aset

➤ **Layanan**

1. Portal PPID
2. Hak Memperoleh Informasi
3. Prosedur Pelayanan Publik
4. Prosedur Keberatan
5. Form Permintaan IP
6. Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa
7. SOP
8. DIP
9. DUMAS
10. SPP

Sedangkan kegiatan yang mengikuti PPID Utama antara lain : 1) Bimbingan Teknis Pelayanan Prima; 2) Rakor PPID lingkup Kementan; 3) Sosialisasi Reformasi Birokrasi; 4) Rakor PPID lingkup Balitbangtan; 5) *Bimbingan Teknis Petugas Layanan PPID Zona Tengah*; 6) *Menghadiri Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi*; 7) *Visitasi Pemeringkatan KIP 2018*; 8) *Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik*, serta 9) *Penghargaan Implementasi Keterbukaan Pelayanan Publik*,

Hasil kegiatan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima, tanggal 8-10 Maret 2018, di Bandung

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Kementerian Pertanian berkaitan sangat erat dengan penerapan dan operasional Manajemen Reformasi Birokrasi, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian kepada masyarakat umum.



Gambar 10. Pembukaan Bimtek oleh Kepala Biro Organisasi Nawawi Nata

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Nawawi Nata, menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Publik ada beberapa hal yang harus dilaksanakan meliputi: penyusunan, penetapan dan penerapan SPP; membentuk dan mengelola pengaduan masyarakat di setiap unit kerja; pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik; Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat; pelaksanaan Forum Konsultasi Publik; pengawasan, SPL, evaluasi dan *monitoring*; serta peningkatan budaya kerja pelayanan prima.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut maka dilakukan Bimtek kompetensi SDM dan peningkatan motivasi pegawai pemberi layanan agar dapat mengubah pola pikir melayani, penguasaan bahasa dan tutur kata, sikap dan perilaku pelayanan prima, tanggal 8-10 Maret 2018, di Hotel *Grand* Tjokro, Bandung.

Pada acara Bimtek ini disampaikan materi tentang: 1) Strategi dan Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, dengan narasumber dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Pertanian. 2) Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3) Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan

narasumber dari Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian. Serta, 4) Manajemen Komunikasi dan Pelayanan Prima, dengan narasumber dari IBM/ASMI *Education Center*.

2. Rakor PPID lingkup Kementan, tanggal 8-9 Mei 2018, di Jakarta

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008, tentang Informasi Publik (IP), maka Kementan telah menerbitkan Permentan No 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pada Permentan tersebut telah ditambahkan unsur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan maupun informasi publik serta menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) pada Kementerian Pertanian.



Gambar 11. Pelaksanaan Rakor PPID lingkup Kementan

Berkaitan erat dengan UU KIP (Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik) tersebut Kementerian Pertanian pada tanggal 8-9 Mei 2018 melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi PPID Kementerian Pertanian Tahun 2018 bertemakan “Peran PPID dalam Penderasan Informasi, Menyongsong Indonesia Lumbung Pangan Dunia tahun 2045”.

Acara dibuka oleh Sekjen Kementan Moh. Syukur mewakili Menteri Pertanian. Dalam sambutan pembukaannya, Moh. Syukur mengatakan "Saat ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, akan membuka peluang bagi Kementerian Pertanian untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, interaktif & mudah diakses oleh Masyarakat". Juga diingatkan olehnya bahwa Kementerian Pertanian mempunyai komitmen dalam memberikan pelayanan informasi, "Pengelolaan informasi publik harus profesional, efisien dan efektif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta harus mampu memberikan pola informasi yang cermat dan penuh tanggung jawab. Hal ini tentu perlu didukung oleh adanya koordinasi dari berbagai pihak terkait."

Rakor PPID Kementan selama 2 hari ini dihadiri dan diikuti oleh 325 orang peserta terdiri dari PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian, Pejabat Fungsional Tertentu seperti Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis lingkup Kementan yang mengelola dokumen informasi publik.

Pelaksanaan Rakor lingkup Kementan tahun 2018 ini mengundang 3 narasumber dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; Komisioner Komisi Informasi Pusat; Akadimisi (Guru Besar Univ. Indonesia); PPID Kementerian Keuangan (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi); dan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian.

Selain penyampaian informasi oleh para narasumber, para peserta Rakor juga langsung dibagi menjadi 4 kelompok kerja dengan materi tentang: Pengisian e-Dokumen di Portal PPID Kementan; Penyusunan Daftar Informasi Publik dan penyiapan di website UK/UPT; Pengisian Agropedia; serta Penderasan Informasi melalui Media Sosial yang dibimbing langsung oleh narasumber dan panitia. Hal ini dilakukan agar peserta Rakor langsung kerja praktek dalam penyiapan materi informasi publik untuk UK/UPTnya masing-masing.

3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi, tanggal 25 Mei 2018, di Jakarta

Balai Besar pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) melaksanakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian di auditorium. Sosialisasi dihadiri oleh seluruh karyawan BBP Mektan. Acara sosialisasi dibuka oleh Suphendi, Kepala Bagian Tata Usaha, mewakili Kepala BBP Mektan.

Dalam sambutan pembukaannya Suphendi menjelaskan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mewujudkan realisasi pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Disamping itu dampak kedalamnya adalah untuk meningkatkan etos kerja dan disiplin pegawai di lingkup di BBP Mektan.



Gambar 12. Narasumber dari Biro OKE saat memberikan Sosialisasi

Kepala Bagian Organisasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian (Biro OK) Kementerian Pertanian, Esti Hermiyati, selaku narasumber yang diundang dalam sosialisasi ini menyampaikan bahwa nilai RB Kementerian Pertanian tahun 2017 adalah sebesar 76,79%. Nilai ini akan terus ditingkatkan hingga sebesar 80% dengan upaya berupa peningkatan *8-point* area perubahan reformasi birokrasi meliputi: Manajemen

perubahan; Penataan peraturan; Penataan penguatan administrasi; Penataan tata laksana; Penguatan sistem manajemen; Penguatan akuntabilitas; Penguatan pengawasan; Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari 8-point area perubahan RB tersebut salah satu hal yang sangat penting adalah tentang penataan sistem manajemen SDM ASN. Dalam penataan sistem manajemen SDM tersebut maka setiap ASN dituntut bekerja secara professional, dengan meningkatkan disiplin dan kinerja ASN sesuai Permentan No. 6 Tahun 2016.

Salah satu hal yang sudah diatur dalam Permentan tersebut adalah tentang waktu kehadiran pegawai dalam bekerja harus tepat waktu, oleh karena itu perlu diterapkan penegakan disiplin tentang waktu dan jam kerja ASN, tambahannya. Saat ini Biro OK Kementerian Pertanian sudah menerapkan kehadiran *online*, sejak bulan Mei 2018 dan akan segera diberlakukan pada bulan Juni untuk seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian.

4. Rakor PPID lingkup Balitangtan, tanggal 28 Mei 2018, di Balitbangtan, Jakarta

Rapat dipimpin oleh Kasi Humas Balitbangtan, serta dihadiri oleh perwakilan UK lingkup Jabodetabek. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dengan adanya penilaian/pemeringkatan KIP lingkup Kementan. Dengan pertemuan ini diharapkan akan adanya persamaan persepsi dari setiap UK dalam pengisian SAQ.

- Yang menjadi responden harus anggota Tim PPID, selanjutnya yang mewakili tanda tangan PPID harus ketua PPID langsung dari setiap unit Kerja.
- Bobot penilaian kuesioner SAQ adalah 40% , selanjutnya verifikasi website mempunyai bobot 60%
- Adapun batas waktu pengisian kuesioner adalah tanggal 31 Mei 2018 pukul 23.59 WIB.
- Informasi Publik yang harus di upload di website harus mengikuti SAQ yang telah dikirim ke masing-masing UK/UPT dari PPID Utama
- Informasi yang harus diisi dalam SAQ meliputi : 1) informasi yang berkaitan dengan profil Badan Publik; 2) Informasi mengenai kinerja badan publik; 3)

Informasi tentang keuangan Badan publik; 4) informasi tentang akses informasi publik; 5) informasi lainnya

- Aplikasi yang menunjang pelayanan publik mempunyai nilai tambah yang lebih kalau sdh masuk dala 5 besar
- Materi2 untuk pengisian SAQ akan diseragamkan lingkung Badan Litbang Pertanian, agar persepsinya sama dalam pengisian. Target Tahun 2018 Balitbangtan harus Juara I.
 1. BBP Mektan diharapkan dapat mempertahankan juara setidaknya bisa 5 besar lagi, oleh karena itu update IP dan website harus dilakukan terus menerus.
 2. Keaktifan Pejabat PPID juga mempunyai nilai tersendiri, apabila ada undangan eselon I yang bisa dapat pejabat ess. III nya atau Ess. II nya maka akan menambah nilai dalam penilaian.
 3. UK/UPT yang mengundang eselon 1 dalam kegiatan pelayanan publik juga akan mandapatkan poin tersendiri.
 4. Perlu juga mengaktifkan media sosial untuk memprosikan dan mendiseminasikan kegiatan Kementan atau program kerja Kementan.
 5. Bulan Juni mulai masa penilaian sehingga diharapkan setiap UK/UPT dapat selalu update data dan informasi pada website masing-masing.

5. Bimbingan Teknis Petugas Layanan PPID Zona Tengah, tanggal 28-30 Juni 2018, di Surabaya

Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) pada hari Kamis tanggal 28 – 30 Juni 2018 melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Informasi Publik bagi petugas pengelola informasi dan dokumentasi zona tengah tingkat Eselon II lingkup Kementan. Kegiatan BIMTEK dihadiri oleh para pejabat pengelola informasi publik yang terdiri dari fungsional pustakawan, pranata humas, pranata komputer, dan arsiparis dari beberapa UK/UPT lingkup Kementan.

Dilaksanakannya Kegiatan Bimtek ini bertujuan mengharmonisasikan PPID lingkup Kementan dalam mengelola informasi dan pemdokumentasian hingga tahap penyampaian informasi kepada publik (masyarakat).



Gambar 13. Acara Pembukaan pada pelaksanaan Bimtek

BIMTEK diresmikan oleh Ir. Syukur Iwantoro, MS., MAB, Sekretaris Jenderal Kementan, yang dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa Kementerian Pertanian pada era keterbukaan informasi saat ini tidak cukup hanya dengan bekerja keras dan menghasilkan kinerja yang sudah nyata dalam menuju swasembada pangan saja, tetapi juga tingkatkan kualitas layanan informasi bagi masyarakat. Lebih lanjut Ir. Syukur Iwantoro, MS., MAB., menganalogikan (PPID) Kementan merupakan salah satu penentu wajah yang mewarnai Kementan. Jadi betapa strategisnya tugas para PPID tersebut. Dengan demikian, PPID harus secara aktif menyampaikan apa saja yang sudah dihasilkan oleh Kementan kepada publik (masyarakat). Ditambahkan juga dalam sambutannya bahwa Menteri Pertanian berpesan walaupun saat ini Kementerian Pertanian sudah menjadi peringkat 4 dalam pemeringkatan penilaian PPID tingkat Kementerian dan Lembaga pada tahun 2017, diharapkan pada tahun 2018 dapat naik peringkat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian selaku PPID Utama dalam mengelola pembinaan dan melaksanakan bimbingan bagi petugas pengelola informasi publik linkup Kementan membagi menjadi tiga zona pembinaan dan pelaksanaan bimbingan. Masing – masing zona tersebut adalah zona barat, zona tengah, dan zona timur.

6. Menghadiri Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi, tanggal 20 Juli 2018, di Jakarta

Biro Humas dan Informasi Publik melaksanakan Sosialisasi tentang Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018, tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, dengan mengundang narasumber Cecep Suryadi, salah satu komisioner Komisi Informasi Pusat. Kegiatan dihadiri oleh PPID Utama dan Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian, di gedung Pusat Informasi dan Agribisnis (PIA), Jakarta.

Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik dalam acara pembukaan menyampaikan bahwa "semua informasi yang diminta publik harus dilayani, apalagi di jaman transparansi seperti saat ini. Hal ini wajib dilakukan karena kita menggunakan dana publik yang berasal dari APBN". Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa penilaian kinerja Kementan saat ini, dapat dilihat dari bagaimana dalam pengelolaan pelayanan publik, oleh karena itu setiap pelayanan harus kita tingkatkan, terutama dalam penanganan sengketa publik.

Poin penting dari Peraturan Komisi Informasi Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 ini adalah adanya kualifikasi permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan itikad baik meliputi : 1) permohonan informasi yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik; 2) permohonan informasi menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara dan/atau menyebabkan penyiapan anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi; 3) permohonan informasi yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali ke badan publik yang sama; 4) permohonan informasi lebih dari satu kali kepada badan publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang diminta; 5) Tidak adanya kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi. Permohonan sengketa informasi publik yang memenuhi unsur-unsur di atas, maka penanganan penyelesaian sengketa akan melalui "**Pemeriksaan Khusus**" tanpa melalui sidang ajudikasi nonlitigasi. Apabila terbukti pemohon akan tercatat dalam daftar hitam, sehingga tidak dapat mengajukan permohonan sengketa selama 1 tahun.



Gambar 14. Narasumber pada saat memberikan penjelasan tentang Perki 01/KEP/KIP/V/2018

7. Visitasi Pemeringkatan KIP 2018, tanggal 28 Agustus 2018, di Serpong

Guna meningkatkan keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian (Kementan) tim penilai melakukan visitasi pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ke Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) yang masuk 5 besar untuk kategori eselon II, Selasa (28/08/2018).

Visitasi ini adalah yang kedua kalinya, setelah pada tahun 2017 BBP Mektan juga masuk 5 besar dan memperoleh peringkat I Keterbukaan Informasi Publik tingkat eselon II lingkup Kementan.

Tim visitasi ini bertujuan untuk melakukan penilaian atas keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan sebagaimana diatur di dalam UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tim visitasi terdiri dari 4 orang, dari Akademik, wartawan, LSM dan 1 orang perwakilan dari Biro Humas dan Informasi Publik Kementan.

Proses penilaian berjalan dengan lancar karena dokumen pendukung yang ditanyakan langsung kepada petugas informasi dalam pelayanannya semua lengkap dan terdokumentasi dengan rapi. Tim penilai juga melihat langsung sarana fasilitas dan kelengkapan dokumen yang ada keterkaitannya dengan KIP di BBP Mektan.



Gambar 15. Tim Visitasi mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan KIP di BBP Mektan

Dalam sambutannya Kepala Balai Besar, Andi Nur Alam Syah, mengatakan bahwa “Peningkatan kinerja PPID di BBP Mektan diupayakan selalu ditingkatkan guna mendukung kebijakan Kementan dalam menuju pemerintahan yang terbuka”.

Dengan masuk 5 besar pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kedua kalinya ini diharapkan BBP Mektan mampu mempertahankan prestasinya yang telah dicapai tahun sebelumnya. Turut hadir dalam acara seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana BBP Mektan.

8. Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik, tanggal 6-8 Desember 2018 di Bogor

Pembentukan PPID berdasarkan pada implementasi keterbukaan informasi publik menuju transparansi penyelenggaraan birokrasi pemerintahan merupakan amanat Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang harus dijalankan. Dalam rangka implementasi Undang – Undang tersebut, maka Kementan telah menerbitkan Permentan No 32/Permentan/OT/.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, serta menunjuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pelapor untuk pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) pada Kementerian Pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut selama kurun waktu satu tahun ini (2018) Biro Humas dan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian sudah melaksanakan dua kali Bimbingan Teknis (BIMTEK). Pada Pengujung tahun 2018 ini kembali Biro Humas dan Informasi Publik mengadakan pertemuan bagi para pengelola informasi publik baik di Eselon I lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) juga Eselon II, Pertemuan kali ini untuk melakukan evakuasi bagi para pengelola informasi publik.

Melalui PPID dan Portal PPID serta website PPID dibuka oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, yang didampingi oleh Marihot H.Panggabean, Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik. Dalam sambutannya Kepala Biro Humas dan Informasi Publik berharap dari evaluasi yang dilaksanakan selama 3 hari ini dapat menghasilkan *draft* perbaikan untuk panduan umum PPID Kementan.

Di utarakan juga saat ini masyarakat yang membutuhkan informasi di Kementan sudah sangat familiar dengan teknologi yang ada saat ini seperti *computer* dan gadget lainnya yang berbasis internet. Oleh sebab itu sebagai pejabat pengelola informasi publik (PPID) di lingkup Kementan sudah saatnya menyiapkan diri dengan pengembangan teknologi dan juga meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan informasi dari dengan pengembangan teknologi dan juga meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan informasi dari unit kerjanya masing-masing. Karena pemohon berita sekarang juga dilindungi oleh Undang-Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) demikian juga dengan penyedia informasi sebagai PPID. Jadi dengan dihasilkannya sebuah pedum untuk PPID baik yang tersedia di *website* maupun portal PPID Kementan diharapkan dengan mudah dan aman dalam menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat sebagai pemohon.

Mengapa demikian, karena jika sampai terjadi sengketa informasi, maka akan sangat mengganggu kinerja PPID Kementan, karena selain waktu yang tersisa juga biaya yang memang dipagu anggaran sebuah UK/ UPT lingkup Kementan tidak ada anggaran khusus untuk sengketa Informasi. Acara Pembukaan diakhiri dengan diskusi, dan dilanjutkan dengan sesi materi pada hari pertama yang berjudul Pengelolaan *Website* PPID oleh Ardiansyah dari Univ. Indonesia.

Dilanjutkan dengan hari kedua dengan materi Penyusunan Daftar Informasi Publik yang disampaikan oleh Agus W Nugroho dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dibuat dua kelompok peserta dengan tugas kelompok satu adalah penyusunan Daftar Informasi Publik, dan Kelompok dua dengan tugas Pengelolaan *Website* dan Portal PPID. Pada hari terakhir tanggal 8 Desember 2018, dipresentasikan dari hasil masing-masing kelompok kerja, dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan evaluasi pengelolaan informasi publik ini ditutup oleh Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Marihot H. Panggabean.

9. Penghargaan Implementasi Keterbukaan Pelayanan Publik,

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) Serpong meraih penghargaan peringkat empat setingkat eselon dua pada penilaian dan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Kementerian Pertanian. BBP Mektan Serpong berhasil meraih peringkat 4 penghargaan di bidang penilaian dan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Sekjen Kementerian pertanian RI.

Piagam diterima langsung oleh Kepala BBP Mektan, Andi Nur Alah Syah dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kantor Kementan, Ragunan, Jakarta. Peringkat ke 1 diraih Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Bogor, disusul Pusat Penelitian Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi di peringkat ke 2. Di peringkat 3 diraih Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Sementara di peringkat ke 5 Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Bogor.

Ada beberapa faktor yang dinilai dalam menentukan peringkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementan tersebut antara lain, penilaian komitmen PPID, penilaian berdasarkan kelengkapan informasi di website dan penilaian berdasarkan SAQ. Dengan meraih peringkat 4, diharapkan menjadi pemicu untuk melakukan pelayanan informasi lebih baik lagi dan ke depan BBP Mektan bisa menjadi yang terbaik lagi.



Gambar 16. Kepala BBP Mektan saat menerima penghargaan KIP 2018

II. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

2.1. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup BBP Mektan dihimpun di Bidang KSPHP BBP Mektan yang berasal dari semua bidang/ instansi terkait. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada bidang/ unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan BBP Mektan yang sudah diunggah di Website BBP Mektan antara lain : Profil BBP Mektan, DIPA, Laporan Keuangan, LAKIP, Laporan Tahunan BBP Mektan, Laporan IKM, Judul kegiatan Perekayasaan, SPP dan SOP pelayanan publik. Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di rak khusus (*filling cabinet*), sedangkan *softcopy* tetap berada di PC dan eksternal Hardisk petugas pelayanan publik dan bagian penghasil informasi (Bagian TU, Bidang PE, Bidang KSPHP, Laboratorium dan Kelompok Perekayasa).

2.2. Daftar Informasi Publik yang dikuasai BBP Mektan

Profil

- Pimpinan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- Visi dan Misi Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- Sejarah singkat Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- Alamat Unit Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- Struktur Organisasi Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- Program kegiatan dan Pendanaan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
- SDM Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

Program dan Kegiatan

- Laporan Tahunan PPID Tahun 2016-2017
- Daftar Informasi Publik BBP Mektan tahun 2017 – 2018
- Laporan Analisis IKM Tahun 2013 - 2017
- Prosedur layanan Informasi Publik tahun 2018
- Daftar Kerjasama BBP Mektan dengan pihak ketiga Tahun 2013 - 2017
- Daftar Paten Alsintan Tahun 2001 - 2017
- Daftar Introduksi Alsintan Tahun 2013 - 2017
- Daftar Kunjungan Stake Holder ke BBP Mektan Tahun 2013 - 2017
- Daftar Kegiatan PKL/ Magang/ Pelatihan Tahun 2013 - 2017
- DIPA BBP Mektan Tahun 2013 – 2018

Dokumen Kinerja

- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) BBP Mektan Tahun 2013 – 2018
- Rencana Strategis (Renstra) BBP Mektan Tahun 2010 – 2019
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT-PK) 2011-2017
- Capaian Kinerja Tahunan 2011-2017
- Judul-Judul Kegiatan Penelitian/Perekayasaan Tahun 2013 – 2017
- Laporan Tahunan BBP Mektan Tahun 2011 - 2017
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBP Mektan Tahun 2011 – 2017
- Laporan Akhir Kegiatan RPTP/RDHP BBP Mektan Tahun 2013 – 2017
- Laporan Keuangan BBP Mektan yang telah di audit Tahun 2013 – 2017
- Neraca Keuangan BBP Mektan yang telah diaudit Tahun 2013-2017
- Bukti LHKNP
- Daftar Pengumuman Lelang Tahun 2017-2018
- Daftar Pengujian Alsintan Tahun 2012 – 2017
- Daftar Draft RSNI Alsintan Tahun 2016 – 2017

III. Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Permentan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup BBP Mektan sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

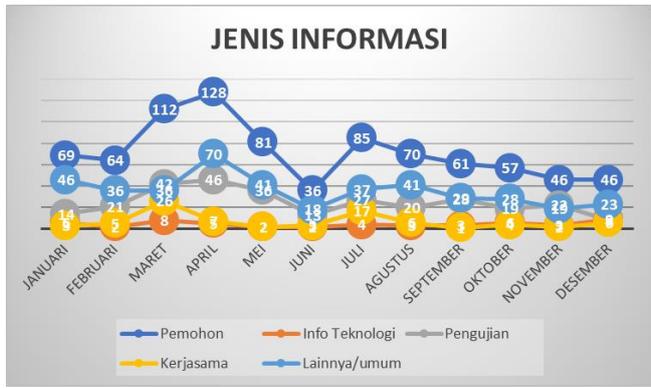
Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan BBP Mektan.

IV. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup BBP Mektan, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku.

Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2018 sebanyak 855 pemohon. Permohonan ini telah direspon dan diselesaikan dengan memberikan informasi yang sesuai dengan permintaan pemohon dengan mengacu pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pengumpulan dan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dilakukan di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian selama tahun 2018, tersaji pada grafik Tabulasi pelayanan informasi dan dokumentasi BBP Mektan tahun 2018 dibawah ini.



Gambar 17. grafik Tabulasi pelayanan informasi dan dokumentasi BBP Mektan tahun 2018

TABULASI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BBP MEKANISASI PERTANIAN TAHUN 2018

BULAN	PEMOHON			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA				PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI				SENGKETA INFORMASI
	INDIVIDU	BADAN HUKUM	KELOMPOK ORANG	DATANG LANGSUNG	ELEKTRONIK	INFO TEKNOLOGI	PENGUJIAN	KERJASAMA	LAINNYA/ UMUM	DIBERIKAN	DITOLAK	SELESAI	TIDAK SELESAI	
JANUARI	33	36		69	0	6	14	3	46	69	0	69	0	
FEBRUARI	18	46		64	0	2	21	5	36	64	0	64	0	
MARET	48	64		112	0	8	42	26	36	112	0	112	0	
APRIL	29	99		128	0	5	46	7	70	128	0	128	0	
MEI	33	48		81	0	2	36	2	41	81	0	81	0	
JUNI	15	21		36	0	2	13	3	18	36	0	36	0	
JULI	25	60		85	0	4	27	17	37	85	0	85	0	
AGUSTUS	38	32		70	0	3	20	6	41	70	0	70	0	
SEPTEMBER	22	39		61	0	3	28	1	29	61	0	61	0	
OKTOBER	13	44		57	0	6	19	4	28	57	0	57	0	
NOVEMBER	12	34		46	0	3	22	2	19	46	0	46	0	
DESEMBER	16	30		46	0	8	8	6	24	46	0	46	0	
JUMLAH	302	553		855	0	52	296	82	425	855	0	855	0	

V. Rencana Tahun 2019

1. Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, tahun 2019 direncanakan akan dilakukan antara lain : melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan BBP Mektan, diharapkan masing-masing bidang di lingkup BBP Mektan dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID BBP Mektan, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik dan tertib.
2. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja eselon II Kementerian Pertanian dapat terlaksana dengan baik, terutama informasi yang akan diunggah di *website*, perlu dibuat mekanisme yang jelas, dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mempublikasikan berbagai informasi.
3. Melengkapi fasilitas pendukung yang belum tersedia : ruang PPID, ruang menyusui dan jalur kursi roda untuk disabilitas.
4. Membuat aplikasi khusus untuk proses layanan pengunjung dan pemohon informasi, hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanannya.

VI. Kesimpulan dan Saran

Dalam pengelolaan dokumen publik di BBP Mektan sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan serta pengelolaan *database* PPID yang masih manual dapat diubah ke sistem yang lebih efektif dan efisien.

Saran ke depan diharapkan pimpinan organisasi dan setiap bagian/bidang dalam suatu organisasi harus saling mendukung dan mempunyai komitmen bersama bahwa pelayanan publik adalah tugas bersama dalam suatu unit kerja bukan hanya bidang KSPHP saja, karena informasi publik berasal dari semua bagian/bidang dalam suatu unit kerja.

Serpong, 9 Januari 2019

Kepala Bidang KSPHP
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Pelaksana Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian,



Dr. Ir. Agung Prabowo, M. Eng.
NIP. 19651020 199203 1 002